Hasil wawancara : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo

Informan : Miftahudin Pegawai Disperindag Sidoarjo Divisi Perdagangan

Pertanyaan :

1. Bagaimana pandangan terhadap peraturan tentang larangan impor pakaian bekas?

*“sebetulnya pemerintah membuat aturan permendag itu kan sebetulnya upaya pemerintah untuk mengatasi banjirnya produk impor yang ada di indonesia. pemerintah ingin melindungi industri didalam negeri. Kalau misal kita bebaskan, industri dalam negeri tidak akan bisa sustain. mereka akan kalah saing dengan produk-produk luar yang masuk ke indonesia, lalu belum tentu pakaian-pakaian bekas yang diimpor itu bersih dalam artian tidak ada penyakit atau virus yang menempel.”*

*“saat ini pemerintah sudah gencar terhadap peraturan tentang larangan impor barang bekas, tidak hanya peraturan saja tetapi juga realisasinya ada. jadi impor yang bekas-bekas itu tidak boleh kecuali yang diatur, misal seperti pesawat terbang bekas dan mesin.”*

1. Langkah-langkah apa yang telah diambil oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mensosialisasikan peraturan larangan impor barang bekas kepada importir dan pelaku usaha thrifting di kab.sidoarjo?

*“upaya pemerintah untuk mengatasai supaya thrifting itu tidak ada ya itu, kita menyuarakan bangga beli produk lokal, kita ada sosialisasi bangga buatan indonesia. Asalnya pedagang ada itu kan karena pasar ada, karena orang itu lebih suka barang2 brandid tapi impor kebanyakan kan seperti itu ya. Sedangkan tugas pemerintah dalam mengatasi itu apa ya itu tadi salah satunya memberi sosialisasi atau mempromosikan barang buatan indonesia, melalui apa? Ya biasanya bisa melalui pameran produk lokal dll.”*

1. Terkait dengan kebijakan ini, apakah Dinas perindustrian dan perdagangan melakukan pemeriksaan rutin terhadap pedagang2 pakaian bekas yang ada di sidoarjo?

*“kalau sidak biasanya kita lakukan dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian. Sidak atau pemeriksaaan itu biasanya berawal dari adanya aduan dari kementrian pusat lalu koordinasi dengan daerah, lalu dari daerah nanti turun ke lapangan biasanya seperti itu. Apalagi sekarang kan gampang aduan dan laporan seperti itu, lewat lapor.co.id bisa orang laporan tentang apapun**. kalau misal pedagang thrifting yang melanggar peraturan seperti menjual pakaian bekas impor atau barang yang sudah sangat tidak layak itu jelas barangnya akan didatangi oleh kementrian perdagangan yang bekerja sama dengan polda. Kita akan terjun ke lapangan biasanya akan disegel lalu dimusnahkan baranya. Kemarin juga sempet tahun 2023 di salah satu gudang balong bendo sebanyak 824bal baju impor bekas itu senilai 10M itu dimusnahkan”*

1. Apakah ada prosedur audit yang digunakan oleh pemerintah terkait dengan peraturan ini? Audit apa? (jika ada)

*“kalau untuk audit yang dapat diterapkan terkait dengan peraturan di disperindag sendiri tidak ada, pemerintah itu membuat peraturan permendag tentang kebijakan impor, tetapi tidak membuat peraturan PERDA atau PERBUB, jadi kami hanya melakukan implementasi di lapangan atau pelaksana. Biasanya yang melakukan audit itu adalah bea cukai untuk memeriksa para importir.”*

1. Apakah ada kendala atau tantangan yang dihadapi dalam melakukan audit terkait dengan implementasi larangan impor barang bekas? Jika ada, apa saja kendala atau tantangan tersebut?

“*Orang jualan kayak gini kan banyak, tidak kelihatan. Bahkan kadang2 online pun juga ada. Cuman kalau online itu kan sebenarnya juga ada kebijakan tidak boleh jual barang bekas, tapi para pedagang itu kadang mengakali di judulnya, entah itu dinamakan preloved atau apa, tapi itu kan sebenarnya bekas. Kalau dari yang ada di lapangan atau pasar mestinya banyak. Dan kita tidak mungkin mengawasi semua pelaku usaha yang ada di Sidoarjo karena kurangnya sumberdaya manusia kita juga.”*

1. Bagaimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama dengan instansi lain, seperti Bea Cukai dan aparat penegak hukum?

*“Kalau misal masih ada yang lolos itu dikarenakan pertama, pintu masuknya itu banyak bisa jadi pelabuhan tikus, itu kan tidak mungkin pengawasan. Kedua itu mekanismenya banyak kalau dulu kan ada barang kiriman sekarang ada yang namanya barang pekerja migran, kan harus dibebaskan itu, bawa barang bekas impor tetapi diakui milik pribadi. Untuk itu kami bekerja sama dengan bea cukai.”*